



# NEWSLETTER TOTUS TUUS

Lembaga Penguatan Nilai Universitas

## TIM REDAKSI

**Penanggung Jawab**  
Ketua Lembaga Penguatan Nilai Universitas:  
Dr. Aloysius Widyawan Louis S.S., M.Phil.

**Pimpinan Redaksi:**  
Fx. Wigbertus Labi Halan, S.Fil., M.Sosio.

**Layouter:**  
Ayu Kristiyaningrum A.Md.A.B.

**Sekretaris:**  
Ayu Kristiyaningrum A.Md.A.B.

**Desain:**  
Antanius Daru Priambada, S.T., M.M

**Alamat Redaksi:**  
Lembaga Penguatan Nilai Universitas  
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya  
Gedung Benedictus  
Lantai 3, Ruang B. 322  
Jalan Dinoyo 42-44 Surabaya

Email: [virtues-institute@ukwms.ac.id](mailto:virtues-institute@ukwms.ac.id)  
Ext.: 304

## DAFTAR ISI

|  |   |
|--|---|
| Dari Meja Redaksi .....                        | 1 |
| Seputar Kampus .....                           | 2 |
| <i>Antiqua et Nova</i> .....                   | 3 |
| Renungan .....                                 | 4 |
| Refleksi Atas Keamanan Siber di Indonesia .... | 5 |
| Di balik Film Pesta Babi .....                 | 6 |
| Refleksi di Tengah Krisis .....                | 7 |
| Infografis .....                               | 8 |

## Dari Meja Redaksi

Sobat Widya Mandala yang terkasih,

Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang prahara besar yang memicu keprihatinan mendalam. Tuntutan 18 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 5,6 triliun terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook periode 2020–2022, bukan sekadar angka di atas berkas hukum. Ini adalah tamparan keras bagi wajah reformasi pendidikan yang selama ini didengungkan lewat narasi modernisasi. Ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta tidak hanya sedang mengadili seorang figur publik, melainkan juga menguji sisa-sisa integritas dari visi besar "Merdeka Belajar" yang telanjur melekat di benak masyarakat.

Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa proyek pengadaan laptop massal yang sejatinya ditujukan untuk pemerataan akses digital di sekolah-sekolah ini justru diselewengkan demi keuntungan pribadi. Ironisnya, angka kerugian negara yang fantastis ini mencuat di tengah jeritan para guru honorer yang upahnya masih jauh dari kata layak, serta potret sekolah di pelosok negeri yang minim fasilitas. Tuntutan maksimal dari jaksa memperlihatkan betapa korupsi di sektor pendidikan dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena secara langsung merenggut hak dasar warganegara untuk mendapatkan fasilitas belajar yang adil dan layak.

Opini masyarakat pun bergulir liar dengan dominasi rasa kekecewaan yang sangat mendalam. Bagi publik, kasus ini mengonfirmasi kecurigaan lama mengenai rapuhnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek teknologi berskala nasional. Kehadiran kelompok informal yang diungkap jaksa dalam persidangan semakin memperkeruh skeptisisme masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan top-down. Di sisi lain, pembelaan dari pihak Nadiem yang merasa tuntutan tersebut tidak adil dan mengeklaim kekayaannya justru merosot selama menjabat, memantik diskusi pelik tentang batas tanggung jawab seorang menteri terhadap penyimpangan birokrasi di bawah kendalinya.

Di balik riuh perdebatan hukum tersebut, masa depan pendidikan Indonesia kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Tragedi Chromebook ini menyisakan trauma institusional yang berat. Kepercayaan masyarakat terhadap agenda digitalisasi sekolah terancam semakin melemah. Kasus ini berpotensi membuat para pengambil kebijakan berikutnya bersikap terlalu defensif atau enggan melakukan inovasi radikal karena takut terseret pusaran hukum. Padahal, ketertinggalan literasi digital anak-anak Indonesia di kancah global menuntut langkah akselerasi yang cepat dan berani.

Demi masa depan pendidikan yang penuh tantangan, kita semua sebagai insan pendidikan wajib berefleksi. Sejauh mana kita telah menjaga integritas moral dan kejujuran di tengah derasnya arus proyek modernisasi pendidikan? Bagaimana cara kita mengembalikan marwah dan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan sebagai ruang suci pembentukan karakter bangsa, ketika puncaknya sendiri runtuh diterpa badai moralitas?

Berkah Dalem

# SEPUTAR KAMPUS

## ULANG TAHUN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



### Daftar Ulang Tahun Tanggal 18 - 24 Mei 2026

- Dr. Ardi Wina Saputra, M.Pd. - PSDKU Pendidikan Bahasa Indonesia
- Yohana Bunga Chrissyani, S.M. - Fakultas Kedokteran
- Lena Ellitan, Ph.D. - Fakultas Bisnis
- Vincentius Hari Kusnawan - Unit Pengelola Aset
- drg. Chrisdina Puspita Sari, M.Sc. - Fakultas Kedokteran
- dr. L. Suwandito, MS. - Fakultas Kedokteran
- Josefine Hira Eksi, S.Sos. - Direktorat Human Capital Management
- Robik Anwar Dani, M.Psi.,Psi. - PSDKU Psikologi

----- Selamat Ulang Tahun dan Tuhan Memberkati -----



## AI dan Layanan Kesehatan

71. Sebagai peserta dalam karya penyembuhan Tuhan, orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan memiliki panggilan dan tanggung jawab untuk menjadi "penjaga dan pelayan kehidupan manusia." [134] Karena itu, profesi layanan kesehatan memiliki "dimensi etika yang hakiki dan tidak dapat disangkal," yang diakui oleh Sumpah Hipokrates, yang mewajibkan para dokter dan profesional layanan kesehatan untuk berkomitmen pada "rasa hormat yang mutlak bagi kehidupan manusia dan kesakralannya." [135] Mengikuti contoh Orang Samaria yang Baik Hati, komitmen ini harus dilakukan oleh setiap orang "yang menolak terciptanya masyarakat yang terpinggirkan, dan bertindak sebagai tetangga, mengangkat dan merehabilitasi yang terpuruk demi kebaikan bersama." [136]

72. Jika dilihat dari sudut pandang ini, AI tampaknya memiliki potensi yang sangat besar dalam berbagai aplikasi di bidang medis, misalnya dalam membantu aktivitas diagnostik para profesional kesehatan, memfasilitasi hubungan antara pasien dan tenaga medis, menawarkan perawatan baru, dan memperluas akses ke perawatan berkualitas juga bagi mereka yang terisolasi atau terpinggirkan. Dengan cara ini, teknologi bisa meningkatkan "kedekatan yang penuh kasih sayang dan cinta" [137] yang harus diberikan oleh penyedia layanan kesehatan kepada orang sakit dan menderita.

73. Namun, jika AI digunakan bukan untuk meningkatkan tetapi untuk menggantikan hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan dengan membiarkan pasien berinteraksi dengan mesin daripada manusia, hal itu akan mereduksi struktur hubungan manusia yang sangat penting menjadi kerangka kerja yang terpusat, impersonal, dan tidak setara. Bukannya menumbuhkembangkan solidaritas dengan orang yang sakit dan menderita, penerapan AI semacam itu justru berisiko memperburuk rasa kesepian yang sering kali menyertai penyakit, terutama dalam konteks budaya di mana "orang tidak lagi di pandang sebagai nilai utama yang harus dirawat dan dihormati." [138] Penyalahgunaan AI ini tidak akan sejalan dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan solidaritas dengan mereka yang menderita.

74. Tanggung jawab atas kesejahteraan pasien dan keputusan mengenai kehidupan mereka merupakan inti dari profesi perawatan kesehatan. Akuntabilitas ini mengharuskan para profesional medis untuk



## Antiqua et Nova

### Seri Dokumen Gerejawi Catatan tentang Hubungan Antara Kecerdasan Buatan dan Kecerdasan Manusia

menggunakan semua keterampilan dan kecerdasan mereka dalam membuat pilihan yang masuk akal dan berlandaskan etika terhadap mereka yang dipercayakan mereka untuk mereka rawat, selalu menghormati martabat pasien yang tidak dapat diganggu gugat dan perlunya persetujuan yang dinformasikan. Oleh karena itu, keputusan mengenai perawatan pasien dan tanggung jawab yang menyertainya harus selalu berada di tangan manusia dan tidak boleh didelegasikan kepada AI. [139]

75. Selain itu, penggunaan AI untuk menentukan siapa yang harus menerima perawatan terutama berdasarkan ukuran ekonomi atau metrik efisiensi merupakan contoh yang sangat bermasalah dari "paradigma teknokratik" yang harus ditolak. [140] Sebab, "mengoptimalkan sumber daya berarti menggunakannya dengan cara yang etis, bersahabat, dan tidak menghukum mereka yang paling rapuh." [141] Selain itu, perangkat AI dalam perawatan kesehatan "mengandung bias dan diskriminasi," di mana "kesalahan sistemik dapat dengan mudah berlipat ganda, tidak hanya menghasilkan ketidakadilan dalam kasus-kasus individual tetapi juga, karena efek domino, bentuk-bentuk nyata dari ketidaksetaraan sosial." [142]

## Rangkuman Pesan Paus Leo XIV pada Hari Komunikasi Sedunia ke-60

Sobat sekalian, perkenankan saya membagikan pesan Paus Leo XIV pada Hari Komunikasi Sedunia ke-60. Tema yang diangkat sangat mendalam: "*Menjaga Suara dan Wajah Manusia*". Lewat pesan ini, kita diajak untuk berefleksi, menengok ke dalam diri, dan merenungkan kembali arti menjadi manusia di tengah kepongungan kecerdasan buatan (AI) dan algoritma digital.

Pertama-tama, Paus mengingatkan bahwa wajah dan suara bukan sekadar tampilan fisik biasa. Orang Yunani kuno menyebut wajah sebagai *prósōpon*, yaitu sesuatu yang hadir untuk membangun hubungan dengan sesama. Sementara dalam bahasa Latin, kata *persona* berakar dari suara yang khas milik seseorang. Keduanya adalah anugerah suci dari Allah yang memantulkan kasih-Nya. Kita bukanlah sekadar kumpulan algoritma biokimia yang kaku.

Sayangnya, keunikan ini kini terancam ketika sistem kecerdasan buatan mulai meniru suara, wajah, bahkan empati manusia. Tantangan terbesar saat ini sebenarnya bukanlah masalah kecanggihan teknologi, melainkan masalah tentang bagaimana kita tetap mempertahankan kemanusiaan kita.

Kemudian, Paus menyoroti bagaimana algoritma dirancang demi keuntungan platform, mengurung kita dalam "gelembung" persetujuan instan, dan mengikis kemampuan berpikir kritis kita. Ada bahaya besar ketika kita terlalu naif mempercayai AI seolah-olah ia adalah teman yang mahatahu. Saat kita menyerahkan proses kreatif, imajinasi, dan proses berpikir sepenuhnya kepada mesin, kita sebenarnya sedang membungkam suara dan menyembunyikan wajah kita sendiri.

Lebih jauh lagi, kehadiran *chatbot* atau *influencer virtual* yang meniru perasaan manusia bisa menjebak kita dalam simulasi relasi yang semu. Ketika kita lebih nyaman mengobrol dengan mesin yang selalu siap sedia daripada dengan manusia nyata, kita kehilangan kesempatan berharga untuk berjumpa dengan sesama yang berbeda. Padahal, dari perbedaan itulah kita belajar berdialog dan membangun persahabatan sejati. Belum lagi risiko disinformasi, bias, dan "halusinasi" data yang menyebarkan pemahaman realitas yang keliru.

Karena itu, Paus Leo XIV menegaskan bahwa kita perlu mengarahkan teknologi agar teknologi menjadi sekutu yang mendukung martabat manusia, bukan ancaman. Ia mengingatkan pentingnya tiga pilar utama: tanggung jawab, kerjasama, dan pendidikan atau literasi. Para pemilik platform harus mengutamakan kesejahteraan bersama di atas keuntungan semata dan bersikap transparan. Sedangkan, dan pemerintah didorong untuk membuat regulasi yang melindungi martabat manusia. Semua sektor, mulai dari industri teknologi, akademisi, jurnalis, hingga pendidik, harus bekerjasama dan berkolaborasi membangun ekosistem dan kewargaan digital yang sehat. Karena itu, sangatlah mendesak, menggalakkan literasi media, informasi, dan AI di semua jenjang pendidikan. Literasi ini akan membantu kita semua, dari kaum muda hingga lansia, untuk berpikir kritis, melindungi privasi, dan memperlakukan AI murni sebagai alat, bukan subjek personal.

Sebagai penutup, ia mengajak kita semua untuk menggunakan teknologi dengan sadar, sembari terus merawat perjumpaan nyata, mendengarkan dengan tulus, dan mencintai sesama dengan kasih yang hidup. Sebab pada akhirnya, keindahan terdalam dari komunikasi adalah ketika wajah dan suara kita mampu memancarkan kehadiran pribadi manusia yang seutuhnya. **(AW, M17, 17052026)**

**Julianto Kevin Santoso / 1323023001**

Keamanan siber pada dasarnya adalah usaha menjaga dunia digital tetap aman. Yang dilindungi bukan hanya lagi komputer, tetapi juga seluruh sistem yang terhubung dengan internet, mulai dari jaringan perusahaan, aplikasi yang kita pakai setiap hari, sampai data pribadi yang tersimpan di server. Tujuannya bisa dibilang sederhana, yakni memastikan informasi tidak bocor, tidak diubah sembarangan, dan tetap bisa diakses ketika dibutuhkan. Teknologi yang digunakan bermacam-macam, seperti enkripsi untuk mengunci data, firewall untuk menyaring lalu lintas jaringan, autentikasi dua faktor agar akun tidak mudah diretas, dan sistem pemantauan yang terus mengawasi aktivitas mencurigakan. Serangan siber di masa kini jenisnya semakin beragam dan tidak lagi bersifat amatir. Phishing misalnya, memanfaatkan kelengahan manusia dengan menyamar sebagai email resmi agar korban menyerahkan kata sandi atau data penting. Ada juga ransomware yang langsung mengunci seluruh file korban lalu menuntut tebusan. Belum lagi serangan DDoS yang membuat layanan online tak bisa diakses karena kelebihan beban. Celah keamanan dalam perangkat lunak yang belum diperbaiki pun sering menjadi pintu masuk mudah bagi peretas.

Masalahnya bukan hanya soal teknologi. Faktor manusia justru sering menjadi titik terlemah. Kata sandi yang terlalu sederhana, lalu adanya kebiasaan sembarangan mengklik tautan yang berseliweran di internet, hingga kurangnya pemahaman dasar soal keamanan siber, semuanya membuka peluang terjadinya kebocoran. Di negara berkembang, perusahaan kecil sering kesulitan memenuhi standar keamanan internasional karena keterbatasan anggaran dan tenaga ahli. Situasi di Indonesia memperlihatkan hal ini dengan jelas: kasus pembobolan data pribadi kerap terjadi, sementara regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi masih dalam tahap awal penegakan.

Dilansir dari Naval Computer Security Incident Response Team atau NAVAL-CSIRT, pada 11 Februari 2025, telah terjadi pembobolan terhadap sistem Kejaksaan Agung Indonesia yang menyebabkan mereka berhasil mendapatkan data yang mencakup informasi pegawai, data tamu, sistem tilang elektronik, hingga data perkara yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Lalu adanya pula pembobolan oleh Bjorka, individu atau kelompok peretas yang mempublikasikan data dari Komisi Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, lalu Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan lainnya. Pembobolan ini sebagai salah satu bentuk protes terhadap lembaga negara yang dianggap kurang

transparan dalam penjabaran data sehingga pembobolan ini sebagai salah satu gerakan untuk menuntut transparansi dari lembaga negara.

Ketika dianalisis dari kebaikan bersama, ketidakmampuan negara untuk mengakomodasi keamanan siber negara menjadi sebuah masalah, karena data masyarakat dijual dan malah terbuka untuk semua orang padahal data masyarakat adalah privasi dari masyarakat itu sendiri. Bahwa dalam aliran Bonum Commune, negara sebagai pihak yang bertugas mengarahkan dan memfasilitasi tercapainya kebaikan bersama. Artinya, negara bukan hanya penyedia layanan administratif, melainkan penjaga kondisi sosial yang memungkinkan warganya hidup aman dan bermartabat. Privasi digital termasuk dalam wilayah ini, sebab perlindungan data bukan lagi isu teknis belaka, tetapi bagian dari hak dasar individu di dunia modern.

Ketika negara gagal memastikan keamanan data, maka kegagalan itu berdampak langsung pada hilangnya rasa aman masyarakat, menurunnya kepercayaan publik, dan retaknya relasi antara pemerintah dan warganya. Kebocoran data dalam konteks ini mengungkap adanya ketimpangan antara peran normatif negara sebagai penjamin kesejahteraan kolektif dan kapasitas aktualnya dalam mengelola infrastruktur digital. Negara yang tidak mampu mengamankan data warganya pada akhirnya gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga Bonum Commune, karena kebaikan bersama mustahil terwujud di tengah kondisi di mana informasi pribadi warga dapat dimanipulasi, disalahgunakan, atau bahkan diperdagangkan secara bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Parida Amalia, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2023). TANTANGAN TERKINI DALAM KEAMANAN INFORMASI ANALISIS RESIKO DAN UPAYA PERLINDUNGAN. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(1), 24–37.
- Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). Ancaman cybercrime di indonesia: Sebuah tinjauan pustaka sistematis. *Jurnal Konstituen*, 5(1), 1-17.
- <https://naval-csirt.tnial.mil.id/hacker-bobol-situs-kejaksaan-agung-dan-curi-data-datarahasia/>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250724082755-4-651755/trump-minta-datawarga-ri-ditransfer-ke-as-begini-respons-prabowo>

### **Fx. Wigbertus Labi Halan** **Lembaga Penguatan Nilai Universitas**

Anda sudah menonton film “pesta babi?’ Akhir-akhir ini, pertanyaan itu kerap saya dapatkan. Substansi pertanyaan ini sebetulnya memberi gambaran tentang suasana negeri ini: ada pemutaran film pesta babi yang isinya hasil riset antropologis yang mendalam tentang konflik agraria akibat perampasan tanah adat di Papua yang melibatkan aparat, dengan dampak lingkungan yang masif. Masyarakat adat melawan praktik perampasan ini. Proses ketika film ini ditonton, ada suasana yang mengejutkan, beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ‘nobar’ ini dibubarkan oleh aparat. Kondisi atau suasana seperti ini sebetulnya menambah rasa ingin tahu dari warga untuk segera menonton film tersebut – makin dilarang malah makin termotivasi orang untuk menonton. Uraian saya berikut ini lebih membahas tentang film sebagai sebuah ajakan untuk memperhatikan hal substansial.

Ini bukan kali pertama saya menonton film yang disutradarai oleh Dandhy Lasono. Kekuatan film-film sebenarnya ada di substansi film tersebut – mendokumentasikan kondisi riil di lapangan. Pada aras ini, orang tidak lagi membahas tentang teknik membuat film dll, yang dibahas adalah isi film itu. Kekuatan ada pada cerita film tersebut – kondisi riil wilayah tersebut. Apa yang ditampilkan dalam film bukan lagi orang-orang yang eye-catching, tetapi wajah-wajah yang tampil apa adanya - tanpa perlu polesan makeup. Ini tentu menjadi pilihan yang berani dan bersamaan dengan berjalannya waktu, film seperti ini mendapat sambutan yang hangat. Lebih dalam dari itu, film yang dihasilkan tersebut memiliki muatan nilai yang diperjuangkan. Siapa saja penontonnya pasti paham bahwa roh keberpihakan pada masyarakat kecil – korban pembangunan – menjadi misi utama dari film-film tersebut.

Uraian tadi kalau saya analogikan seperti pengalaman beberapa mahasiswa yang berencana membuat restoran ala Korea. Apa yang mereka lakukan pertama kali adalah menyiapkan desain interior ala Korea, pakaian ala Korea dll. Dosen kuliner yang mendampingi mereka memberi satu nasehat yang menyadarkan mereka tentang hal esensial. ‘Sebelum mengurus segala desain interior, fokus dulu ke makanan yang kalian sajikan, apakah sudah sesuai dengan standar makanan Korea? Jangan mudah terjebak pada hal-hal yang tidak substansial.

Orang bisa saja senang dengan kondisi restoran Anda tetapi saat makan, mereka tidak menikmatinya. Masih lebih baik mereka kembali lagi karena makanan Anda enak dari pada mereka kembali hanya untuk foto-foto.”.

Nasehat dosen kuliner ini menyadarkan saya perihal apa yang menjadi prioritas – jangan terburu-buru memikirkan polesan tanpa membenahi hal substansial. Hal yang sama juga terjadi dalam film. Tanpa roh, tanpa misi, film akan tinggal seperti iklan sambil lalu, yang mana mereka yang terlibat dalam film tersebut, sesudah keluar dari frame kamera akan bermain peran lain. Film karya Dandhy kerap membongkar panggung depan dan panggung belakang, seolah-olah tidak ada lagi sekat antara dua panggung tersebut. Apa yang diperlihatkan bukan satu ramuan di panggung belakang, tetapi benar-benar yang ditampilkan adalah kondisi sebagaimana yang terjadi saat itu. Tidak ada ketakutan sama sekali bahwa nanti film macam ini tidak dintonton, tetapi misi dan identitas film itu tetap dipertahankan – dan ternyata banyak penontonnya.

Hal lain yang juga menjadi kekuatan dalam film-film yang disutradarai Dandhy adalah kolaborasi. Mereka tidak bekerja sendirian ada komunitas-komunitas yang dilibatkan. Ini gambaran paling terang benderang tentang kekuatan ekosistem. Ketika komunitas-komunitas lain tahu tentang misi dan identitas dari karya Dandhy, mereka yang juga mengusung misi yang sama akan terlibat – bahu-membahu mendukung kelancaran pembuatan film tersebut. Masyarakat yang ada di dalam frame film pun paham perjuangan tersebut.

Belajar dari film yang disutradarai Dandhy dkk, apapun karya kita, fokus terlebih dahulu ke hal substansial, apa yang menjadi misi kita,kenali, pahami, jangan mudah tergoda untuk mengurus hal-hal yang bersifat polesan hanya karena ‘dunia’ cenderung melakukan hal demikian. Apa yang menjadi kekhasan, identitas kita, itulah yang perlu digarap dan diperjuangkan dengan penuh komitmen dalam bidang karya manapun. Pada saatnya akan datang mereka yang mau berjuang bersama hanya karena mereka tahu kita komit pada hal tersebut.

# REFLEKSI DI TENGAH KRISIS: RAKYAT DESA TIDAK PAKAI DOLLAR

**Antanius Daru Priambada, S.T., M.M.**  
**Lembaga Penguatan Nilai Universitas**

Sabtu, 16 Mei 2026 Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dalam rangka meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih. Ada hal yang menarik saat kunjungan Presiden tersebut yakni ketika sedang memberikan pidato yang membahas tentang kondisi rupiah yang sedang melemah, "Mau dollar berapa ribu kek, kan kalian yang di desa-desa nggak pake dollar. Yang pusing ya yang suka keluar negeri. Selama PURBAYA menteri keuangan bisa senyum, nggak usah khawatir". Mungkin pernyataan yang disampaikan dimaksudkan untuk memberikan ketenangan di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang semakin melemah. Namun, respon dari masyarakat justru menjadi kritis akan tanggapan presiden atas kondisi ekonomi Indonesia.

Sebagian masyarakat menangkap pernyataan tersebut sebagai bentuk penyederhanaan atas masalah ekonomi yang sejatinya sangat kompleks. Masyarakat desa memang tidak menggunakan dollar untuk transaksi secara langsung. Namun nilai tukar rupiah terhadap dollar tetap memiliki dampak yang nyata terhadap harga kebutuhan pokok. Harga bahan bakar minyak, pupuk, pakan ternak, hingga berbagai barang yang terikat dalam rantai pasok global sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Ketika rupiah melemah, daya beli masyarakat desa akan terdampak, meski tidak menggunakan selembar dollar sekalipun. Hal ini yang membuat pernyataan presiden terasa kurang menyentuh realita yang dihadapi rakyat kecil sehari-hari.

Gaya komunikasi yang digunakan dalam pidato tersebut menjadi bahan refleksi. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, rakyat tidak hanya membutuhkan ketenangan atau jaminan "semua baik-baik saja", tetapi rakyat membutuhkan kejelasan; apa yang sedang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan apa tindakan pemerintah untuk mengatasinya. Komunikasi yang menenangkan tanpa disertai arahan dan solusi konkret berisiko menimbulkan kesan bahwa pemimpin tidak sepenuhnya memahami persoalan yang terjadi. Rakyat tidak perlu narasi yang menenangkan saja, mereka membutuhkan kejelasan dan ajakan untuk bergerak bersama.

Jika persoalan tersebut ditarik ke dalam konteks organisasi, rakyat yang berada di lapisan paling bawah dapat dianalogikan sebagai anggota atau karyawan dalam sebuah organisasi. Mereka selalu membutuhkan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Ketika organisasi menghadapi krisis, komunikasi menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan dan keterlibatan

seluruh anggota. Pernyataan yang bersifat normatif tanpa disertai arahan yang jelas justru dapat menimbulkan kebingungan dan jarak antara pimpinan dengan yang dipimpin. Brené Brown mengingatkan bahwa pemimpin yang berani bukanlah yang selalu memiliki semua jawaban, melainkan yang berani berkata: "I see you. I hear you. I don't have all the answers, but I'm going to keep listening and asking questions." Ketika seluruh anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang situasi yang sedang dihadapi, mereka akan lebih mudah bergerak dalam satu arah dan berkontribusi secara nyata pada solusi bersama.

Pada akhirnya refleksi ini bukan semata tentang nilai tukar rupiah atau kebijakan pemerintah. Ini tentang bagaimana sebuah organisasi mampu membangun pemahaman bersama dan keselarasan arah. Kejelasan informasi, transparansi, dan keberanian untuk mengakui kompleksitas menjadi penting dalam membangun kepercayaan. Ketika seluruh anggota organisasi memahami situasi yang sedang dihadapi dan memiliki gambaran akan langkah yang perlu diambil, maka peluang bertahan dan bangkit ditengah krisis menjadi lebih besar. Akhirnya, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar rasa tenang, tetapi keyakinan yang tumbuh dari pemahaman yang utuh dan keterlibatan bersama.

## KRONOLOGI KASUS NADIEM MAKARIM HINGGA DITETAPKAN TERSANGKA KORUPSI CHROMEBOOK

### FEBRUARI 2020

- Nadiem Makarim Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset & Teknologi/ Mendikbud Ristek Bertemu Google Indonesia
- Pertemuan Membicarakan Produk dari Google dalam Program Google O-Education
- Program Gunakan Chromebook Bisa Dipakai Kementerian Terutama Peserta Didik
- Dalam Beberapa Kali Pertemuan Disepakati Produk dari Google: Chrome OS & Chrome Device Management/CDM
- Dibuat Melalui Proyek Pengadaan Alat Teknologi Informasi & Komunikasi/TIK

### MEI 2020

- Nadiem Ajak Anak Buah Rapat Tertutup Via Zoom Bahas Kewajiban Penggunaan Chromebook dalam Proyek Pengadaan TIK:
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar & Pendidikan Menengah/ Dirjen Paud Dikdasmen
  - Kepala Badan Ditbang Kemendikbud Ristek
  - Staf Khusus Menteri

### MEI 2020

- Nadiem Jawab Surat Google Untuk Ikut Partisipasi dalam Pengadaan Alat TIK di Kemendikbud Ristek
- Sejak 2019, Mendikbud Sebelumnya Muhadjir Effendy Tak Pernah Respons Surat Google karena Uji Coba Pengadaan Chromebook Gagal & Tidak Bisa Dipakai untuk Sekolah Garis Terluar/Daerah Terluar Tertinggal Terdalam/3T

### FEBRUARI 2021

- Nadiem Terbitkan Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan/Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus/ DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 Dalam Lampiran Peraturan Terdapat Spesifikasi\*

### 4 SEPTEMBER 2025

- Kejaksaan Agung/Kejagung Tetapkan Nadiem Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Laptop Chromebook Kerugian Negara Lebih dari Rp 1,98 Triliun Sebelum Nadiem Ada 4 Tersangka: Sri Wahyuningsih/SW, Mulatsyah/MUL, Jurist Tan/JT & Ibrahim Arif/IBAM

### 3 ATURAN DILANGGAR NADIEM

- Peraturan Presiden/Perores Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik 2021
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang Diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP Nomor 7 Tahun 2018 yang Diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



\* Disampaikan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung/Kejagung Nurcahyo pada Kamis 4-9-2025

\* Kepala Pusat Penerangan Hukum/Kapuspenkum Kejagung Sebut Penetapan Tersangka Nadiem Berdasarkan Hasil Pemeriksaan & Alat Bukti

\* Nadiem Kini Ditahan 20 Hari Sejak 4 September 2025 di Rumah Tahanan/Rutan Salemba

KLY LIPUTAN 6

Sumber Data: Liputan6.com  
Olah Data: Devira Prastiwi  
Grafis: Abdillah | Tayang: 5 September 2025

Liputan6online  
@liputan6dotcom

### Sumber:

<https://www.liputan6.com/news/read/6151978/infografis-kronologi-kasus-nadiem-makarim-hingga-ditetapkan-tersangka-korupsi-chromebook>